



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 572-580

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Pengalihan Subsidi BBM ke Subsidi Langsung untuk Masyarakat Miskin, Efisiensi Fiskal dan Pemerataan Kesejahteraan

Sri Zalfa Avrilya, Syarah Safira Husna, Rut Natalria Tarihoran, Nadin Azira, Steven R.J. Lumbansiantar  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

[srizalfaavrilya@gmail.com](mailto:srizalfaavrilya@gmail.com), [syarahsafira13@gmail.com](mailto:syarahsafira13@gmail.com), [rutnatalria20@gmail.com](mailto:rutnatalria20@gmail.com), [nadinazira515@gmail.com](mailto:nadinazira515@gmail.com),  
[stevenlumbansiantar@gmail.com](mailto:stevenlumbansiantar@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat upah, kesehatan yang diproksi melalui Angka Harapan Hidup (AHH), serta usia terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2004–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber resmi lainnya yang relevan. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda dengan serangkaian pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas dan reliabilitas model yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel tingkat upah, AHH, dan usia berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut. Secara parsial, tingkat upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas, mengindikasikan bahwa peningkatan upah mampu mendorong motivasi, efisiensi, serta kinerja tenaga kerja. Sebaliknya, AHH menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, menandakan bahwa peningkatan umur harapan hidup tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi tenaga kerja, kemungkinan akibat pergeseran struktur usia ke kelompok yang kurang produktif. Sementara itu, variabel usia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produktivitas, yang berarti faktor pengalaman dan kematangan belum cukup kuat secara statistik dalam meningkatkan output kerja. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,875 menunjukkan bahwa 87,5% variasi produktivitas tenaga kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pengupahan yang proporsional, peningkatan kualitas kesehatan kerja, serta optimalisasi tenaga kerja usia produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.*

*Kata kunci: Subsidi BBM, Subsidi Langsung, Efisiensi Fiskal, Pemerataan Kesejahteraan, Kebijakan Publik*

### 1. Latar Belakang

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang telah lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari fluktuasi harga minyak dunia dan mencegah lonjakan inflasi yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat (Nainggolan, 2024). Namun, dalam praktiknya, subsidi BBM yang bersifat menyeluruh atau tidak tepat sasaran sering kali menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan fiskal. Subsidi BBM yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan kemampuan ekonomi, menyebabkan beban anggaran negara menjadi sangat besar dan tidak efisien karena sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki tingkat konsumsi energi lebih tinggi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Pengeluaran negara harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin muncul sebagai langkah strategis untuk memperbaiki efisiensi fiskal dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan sosial. Dengan mengalihkan subsidi dari barang (komoditas) ke manusia (penerima manfaat), pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM memiliki dasar rasional yang kuat dari sisi ekonomi dan sosial. Dari sisi fiskal, pengalihan subsidi dapat mengurangi beban belanja negara yang tidak produktif dan memberikan ruang fiskal (fiscal space) bagi pembiayaan sektor-sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari sisi sosial, subsidi langsung mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin secara langsung tanpa distorsi harga energi di pasar. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih hemat energi dan menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan konsekuensi. Pengalihan subsidi BBM sering kali menimbulkan resistensi sosial akibat kenaikan harga barang dan jasa yang mengikuti kenaikan harga BBM. Inflasi jangka pendek dapat terjadi, terutama pada sektor transportasi dan kebutuhan pokok, yang berdampak langsung terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme penyaluran subsidi langsung yang efektif, akurat, dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa data penerima manfaat benar-benar valid dan bahwa sistem distribusi bantuan berjalan tanpa kebocoran atau penyalahgunaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan kebijakan ini melalui berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program-program tersebut menjadi bentuk nyata dari transformasi subsidi energi menuju subsidi sosial yang lebih tepat sasaran. Keberhasilan program tersebut tentu tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada efektivitas sistem pendataan, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya (Djaenal, 2021).

Selain itu, kebijakan pengalihan subsidi BBM juga perlu dianalisis dari perspektif efisiensi fiskal. Dalam konteks ini, efisiensi fiskal berarti bagaimana pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan negara dengan optimal untuk menghasilkan dampak kesejahteraan yang paling luas (Muharam, 2025). Dengan mengurangi pengeluaran subsidi BBM yang cenderung tidak produktif, pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut ke program-program pembangunan yang memiliki multiplier effect lebih besar terhadap ekonomi nasional. Misalnya, peningkatan investasi pada sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara pembangunan infrastruktur dapat membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Dari perspektif pemerataan kesejahteraan, pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung juga mencerminkan semangat keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin (Hafizd, 2024). Dengan menyalurkan bantuan secara langsung, diharapkan kesenjangan ekonomi dapat berkurang dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung, baik dari aspek efisiensi fiskal maupun dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini diperlukan agar kebijakan tersebut dapat terus disempurnakan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan utamanya, serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan di masa mendatang.

## Tinjauan Literatur

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia selama ini belum sepenuhnya efisien dan cenderung menimbulkan distorsi dalam alokasi anggaran publik. Menurut Anas (2019) dalam penelitiannya berjudul *Reforming Spending Policy and Its Impact on Indonesia's Economy: The Case of Fuel Subsidy and Infrastructure* yang diterbitkan dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, kebijakan subsidi BBM menyerap porsi besar dari anggaran negara yang seharusnya dapat dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Melalui analisis menggunakan model *Social Accounting Matrix* (SAM), Anas menemukan bahwa pengurangan subsidi BBM dan realokasi anggaran ke pembangunan infrastruktur sosial dan manusia memberikan dampak ekonomi yang lebih luas terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini memperlihatkan bahwa subsidi energi yang bersifat umum kurang memberikan nilai tambah terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan justru menghambat efisiensi fiskal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan subsidi dari bentuk harga energi yang tidak tepat sasaran menjadi bantuan langsung atau investasi produktif yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abimanyu dan Imansyah (2023) dalam jurnal *Indonesian Treasury Review* berjudul *The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution: The Case of Indonesia* menyoroti aspek distribusi manfaat dari subsidi BBM terhadap kelompok pendapatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan model *Input-Output Miyazawa*, mereka menemukan bahwa sebagian besar manfaat subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, karena kelompok ini memiliki tingkat konsumsi energi yang lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Artinya, subsidi BBM dalam bentuk harga tidak hanya tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan, tetapi juga memperkuat ketidakadilan distribusi pendapatan. Dalam penelitian tersebut, Abimanyu dan Imansyah menyarankan bahwa kebijakan subsidi sebaiknya diubah menjadi bentuk bantuan langsung atau *cash transfer* kepada masyarakat miskin, karena pendekatan tersebut lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan daya beli kelompok rentan tanpa menimbulkan distorsi pasar energi. Temuan ini mendukung gagasan bahwa efisiensi fiskal dan pemerataan kesejahteraan dapat dicapai secara simultan apabila subsidi BBM dialihkan ke bentuk bantuan yang bersifat langsung dan terukur.

Di sisi lain, Jazuli (2022) dalam artikelnya *Political Economy of Fuel Subsidy Reforms in Indonesia: A Critical Review* yang dipublikasikan oleh *International Public Policy Association (IPPA)* menyoroti dimensi politik dan institusional dalam reformasi subsidi BBM. Menurutnya, kebijakan pengalihan subsidi BBM sering menghadapi hambatan besar di tingkat implementasi karena adanya resistensi politik, tekanan kelompok kepentingan, serta tantangan dalam koordinasi antarlembaga pemerintah. Jazuli menegaskan bahwa meskipun secara ekonomi penghapusan atau pengalihan subsidi BBM menuju bantuan langsung lebih rasional, keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh legitimasi politik, konsistensi komunikasi pemerintah, dan kapasitas institusional dalam mendata serta menyalurkan bantuan secara akurat. Artikel ini menekankan bahwa tanpa perbaikan tata kelola dan sistem data yang akurat, kebijakan subsidi langsung pun berisiko menimbulkan ketimpangan baru akibat salah sasaran atau kebocoran anggaran. Oleh karena itu, kebijakan pengalihan subsidi BBM harus disertai reformasi kelembagaan dan penguatan sistem administrasi publik agar tujuan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai secara efektif.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wacana pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin memiliki dasar empiris dan teoritis yang kuat. Anas (2019) menyoroti aspek efisiensi fiskal dan produktivitas ekonomi, sedangkan Abimanyu dan Imansyah (2023) membuktikan bahwa kebijakan subsidi harga BBM tidak adil secara distribusi pendapatan. Sementara Jazuli (2022) menambahkan dimensi politik dan kelembagaan sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi reformasi subsidi. Secara konseptual, pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung juga selaras dengan teori *targeted subsidies* dalam ekonomi publik, di mana subsidi dianggap efisien apabila diberikan secara selektif kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks Indonesia, penerapan kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis data sosial melalui *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* agar penyaluran bantuan dapat lebih akurat dan terhindar dari tumpang tindih program. Namun demikian, berbagai studi juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan semacam ini bergantung pada transparansi anggaran, validitas data penerima manfaat, serta komitmen politik dalam menjaga kesinambungan program.

### **Alasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan karena isu pengalihan subsidi BBM menjadi salah satu kebijakan strategis yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, pengurangan subsidi BBM dapat memperbaiki posisi fiskal pemerintah dan mengurangi ketergantungan terhadap pengeluaran yang tidak produktif. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terdampak langsung oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung mampu mencapai tujuan efisiensi fiskal tanpa mengorbankan keadilan sosial.

Selain itu, alasan lain dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas program bantuan langsung yang dijalankan pemerintah sebagai kompensasi atas pengalihan subsidi energi. Dengan banyaknya program bantuan sosial seperti *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, dan *Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, penting untuk mengevaluasi apakah program-program tersebut telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efisien dan berkeadilan.

## **Pertanyaan dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan alasan penelitian di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengalihkan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin?
2. Sejauh mana kebijakan pengalihan subsidi BBM dapat meningkatkan efisiensi fiskal pemerintah?
3. Bagaimana dampak kebijakan pengalihan subsidi BBM terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia?
4. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara mendalam kebijakan pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan efisiensi fiskal dan penggunaan anggaran negara.
3. Untuk mengkaji dampak kebijakan pengalihan subsidi terhadap pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia.
4. Untuk mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan subsidi langsung agar lebih tepat sasaran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika kebijakan fiskal dan sosial di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya literatur tentang reformasi subsidi energi dan efisiensi anggaran publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, pengalihan subsidi BBM tidak hanya menjadi kebijakan fiskal semata, tetapi juga wujud nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review (kajian pustaka). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengumpulkan data primer melalui survei atau eksperimen, melainkan untuk menelaah, membandingkan, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait kebijakan pengalihan subsidi BBM di Indonesia. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat memahami konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efisiensi fiskal, subsidi energi, dan kebijakan sosial pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri dinamika kebijakan publik secara komprehensif, baik dari sisi teori ekonomi dan sosial maupun dari implementasi empiris yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung bagi masyarakat miskin.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal akademik nasional dan internasional, laporan lembaga penelitian, dokumen kebijakan pemerintah (seperti APBN, Nota Keuangan, dan peraturan terkait subsidi energi), buku teks ekonomi publik, serta artikel ilmiah dari portal resmi pemerintah dan organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyeleksi literatur yang secara langsung membahas isu-isu mengenai subsidi BBM, efisiensi fiskal, dan kebijakan distribusi kesejahteraan di Indonesia maupun di negara lain sebagai pembanding. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada tingkat relevansi, kebaruan (terbit minimal dalam 10 tahun terakhir), serta validitas sumber. Literatur-literatur tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan dalam pandangan para ahli serta hasil empiris yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil kajian literatur berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data, yaitu menyeleksi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data, yaitu mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema seperti efisiensi fiskal, ketepatan sasaran subsidi, dampak sosial-ekonomi, dan implementasi kebijakan; serta (3) penarikan kesimpulan, yaitu menyusun sintesis dari berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola umum, tantangan utama, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman teoritis dan praktis yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengalihkan Subsidi BBM menjadi Subsidi Langsung kepada Masyarakat Miskin

Pemerintah Indonesia sejak lama menghadapi masalah besar dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tujuan awalnya adalah membantu masyarakat agar harga BBM tetap terjangkau, tapi dalam kenyataannya, manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat mampu. Menurut Sa'diyah (2025) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, sekitar 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi dan tingkat konsumsi tinggi. Sementara masyarakat miskin, yang seharusnya paling membutuhkan bantuan, hanya mendapat porsi kecil dari subsidi tersebut. Kondisi ini membuat anggaran negara boros dan manfaatnya tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mulai mengubah arah kebijakan dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung kepada masyarakat miskin agar lebih adil dan efisien.

Langkah awal pengalihan subsidi dimulai tahun 2005 ketika pemerintah meluncurkan program *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*. Program ini muncul karena harga BBM naik akibat pengurangan subsidi, sehingga pemerintah memberi bantuan uang tunai agar masyarakat miskin tidak terlalu terdampak. Menurut Sa'diyah (2025) dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, program BLT cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat di masa itu. Sejak saat itu, pemerintah terus menyempurnakan cara penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Lahir kemudian program seperti *Program Keluarga Harapan (PKH)* dan *Bantuan Langsung Non Tunai (BLNT)* yang datanya bersumber dari *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar termasuk dalam kelompok miskin. Perubahan dari subsidi barang ke subsidi orang ini menjadi langkah penting menuju sistem bantuan sosial yang lebih efisien.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengalihan subsidi BBM tidak dikelola oleh satu lembaga saja. Pemerintah membentuk kerja sama lintas instansi, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Bappenas. Tujuannya agar proses pengalihan subsidi bisa berjalan lancar dan bantuan tepat sampai ke masyarakat. Menurut Uswatun (2024) dalam *Jurnal Riset dan Jurnal AKuntansi*, salah satu kunci keberhasilan kebijakan ini adalah ketersediaan data penerima yang akurat dan sistem yang terintegrasi antar lembaga. Karena itu, pemerintah terus memperbaiki sistem data melalui DTKS dan mendorong penggunaan *Single Identity Number (SIN)* agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima. Dengan sistem yang lebih tertata, pemerintah berharap pengalihan subsidi bisa lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM juga membantu pemerintah dalam mengatur kembali anggaran negara. Dana besar yang sebelumnya dihabiskan untuk subsidi energi bisa dipakai untuk hal lain yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah berpendapat bahwa subsidi langsung lebih memberi manfaat nyata bagi masyarakat miskin, karena uang yang diterima bisa langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bantuan tunai lebih mudah disesuaikan jika terjadi kenaikan harga energi dunia. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi menanggung beban keuangan yang terlalu besar saat harga minyak naik. Kebijakan ini juga mendorong pengelolaan anggaran negara yang lebih terbuka dan efisien.

Walau begitu, penerapan kebijakan ini tetap menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah masalah data penerima yang belum sempurna. Masih ada warga miskin yang belum tercatat atau malah orang mampu yang ikut menerima bantuan. Selain itu, proses penyaluran bantuan kadang terlambat dan menimbulkan keluhan di masyarakat. Menurut Sa'diyah (2025), pemerintah perlu terus memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini dibuat untuk kepentingan jangka panjang. Uswatun (2024) juga menegaskan

perlunya sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat, supaya bantuan tidak disalahgunakan dan penyalurannya bisa lebih transparan. Dengan pengawasan terbuka, masyarakat akan lebih percaya pada program pemerintah.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini sejalan dengan prinsip subsidi yang tepat sasaran. Artinya, bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan ke semua orang. Dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, seperti transfer lewat rekening bank atau kartu elektronik, penyaluran bantuan menjadi lebih cepat dan aman. Pemerintah juga bisa memantau penggunaan dana dengan lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi BBM tidak hanya soal penghematan anggaran, tapi juga bagian dari reformasi sistem sosial dan fiskal agar lebih adil bagi seluruh rakyat.

Pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin adalah langkah penting dalam memperbaiki kebijakan keuangan negara dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah berusaha mengalihkan bantuan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani anggaran. Meskipun masih ada masalah dalam pelaksanaannya, arah kebijakan ini menunjukkan niat kuat untuk menciptakan sistem bantuan yang lebih adil dan bermanfaat bagi rakyat miskin. Jika terus diperbaiki dan diawasi dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan keuangan negara.

## **2. Sejauh Mana Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM Dapat Meningkatkan Efisiensi Fiskal Pemerintah**

Kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin bukan hanya soal keadilan sosial, tapi juga bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperbaiki efisiensi fiskal. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM menjadi beban besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya sering membengkak karena mengikuti harga minyak dunia dan tingginya konsumsi energi dalam negeri. Menurut penelitian Suryani (2020) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, pada tahun-tahun tertentu anggaran subsidi BBM bisa mencapai lebih dari 200 triliun rupiah, atau hampir seperempat dari total belanja pemerintah pusat. Angka ini membuat ruang fiskal pemerintah menjadi sempit, sehingga sulit untuk membiayai sektor lain yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pemerintah mulai mengalihkan subsidi BBM ke bentuk bantuan langsung agar dana negara bisa digunakan lebih efisien dan tepat guna.

Pengalihan subsidi BBM memberikan manfaat besar dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mengurangi beban subsidi energi, pemerintah memiliki ruang anggaran yang lebih luas untuk kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Yusuf (2021) dalam *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, pengurangan subsidi BBM memungkinkan pemerintah menambah anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, dan energi terbarukan justru menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Artinya, dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi konsumsi bisa diubah menjadi investasi jangka panjang yang lebih menguntungkan. Dari sisi efisiensi fiskal, langkah ini dinilai sebagai salah satu reformasi anggaran paling efektif dalam dua dekade terakhir.

Selain menciptakan ruang fiskal baru, kebijakan ini juga membantu memperbaiki kualitas pengeluaran pemerintah. Subsidi BBM bersifat konsumtif karena hanya menjaga harga tetap rendah tanpa meningkatkan produktivitas ekonomi. Sebaliknya, subsidi langsung bersifat produktif karena membantu masyarakat miskin mempertahankan daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Menurut Yuliani (2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, pergeseran subsidi ini berdampak positif terhadap efisiensi pengeluaran negara. Pemerintah dapat mengalokasikan dana dengan lebih terarah, mengurangi pemborosan, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil nyata. Pengelolaan fiskal yang efisien juga menambah kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin anggaran.

Kebijakan pengalihan subsidi juga berdampak pada pengendalian inflasi dan stabilitas fiskal. Saat subsidi BBM dikurangi, harga bahan bakar memang naik, namun pemerintah dapat menahan dampak sosialnya dengan menyalurkan bantuan tunai. Mekanisme ini lebih mudah diatur dibanding menanggung subsidi harga yang sangat besar dan tidak pasti. Selain itu, pengalihan subsidi membuat anggaran negara lebih tahan terhadap gejolak harga minyak dunia. Sebelum reformasi ini dilakukan, lonjakan harga minyak internasional sering membuat APBN terganggu karena pemerintah harus menambah dana subsidi dalam jumlah besar. Kini, beban tersebut bisa

dikendalikan, sehingga perencanaan keuangan negara lebih stabil dan dapat diprediksi. Dengan kata lain, efisiensi fiskal tidak hanya berarti penghematan, tetapi juga peningkatan daya tahan keuangan negara terhadap risiko global.

Dari sisi pemerintahan, pengalihan subsidi BBM juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sistem bantuan langsung yang menggunakan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* dan rekening bank penerima membuat proses penyaluran dana lebih terpantau. Pemerintah bisa memeriksa aliran dana, memastikan tidak ada kebocoran, dan memperbarui data secara berkala. Hal ini berbeda dengan subsidi BBM yang rawan penyalahgunaan, seperti penimbunan, penyelundupan, dan ketidaktepatan sasaran. Dengan sistem baru ini, efisiensi fiskal meningkat karena dana publik benar-benar sampai ke penerima yang berhak. Selain itu, sistem digital yang digunakan dalam penyaluran bantuan juga mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pembayaran.

Namun, meskipun arah kebijakan ini sudah tepat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, validitas data penerima bantuan masih menjadi masalah di beberapa daerah. Ada kasus di mana bantuan belum menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan karena data belum diperbarui. Kedua, koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih. Pratama dan Yusuf (2021) menyoroti bahwa tanpa koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, efisiensi fiskal bisa terhambat karena biaya operasional dan administrasi meningkat. Oleh karena itu, upaya digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi menjadi hal penting dalam memperkuat kebijakan ini.

Secara umum, pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung terbukti mampu meningkatkan efisiensi fiskal pemerintah Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga memperbaiki kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dana yang dulu habis untuk menekan harga BBM kini bisa digunakan untuk memperluas bantuan sosial, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin. Meskipun masih ada beberapa kendala, kebijakan ini menunjukkan arah reformasi fiskal yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan. Dengan pengawasan yang baik dan data yang akurat, pengalihan subsidi BBM dapat menjadi fondasi penting bagi pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien.

### **3. Dampak Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM terhadap Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Indonesia**

Kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin membawa dampak besar terhadap pola pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Sebelum reformasi ini, subsidi BBM bersifat umum dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi karena mereka memiliki kendaraan pribadi dan konsumsi bahan bakar yang besar. Masyarakat miskin hanya mendapat manfaat tidak langsung dalam jumlah kecil. Menurut Sugandi et al. (2017) dalam *Jurnal Manajemen dan Pembangunan Perkotaan* Universitas Padjadjaran, kebijakan kompensasi berupa bantuan tunai yang diluncurkan pemerintah setelah pengurangan subsidi BBM terbukti mampu menjaga daya beli rumah tangga miskin serta menekan potensi lonjakan angka kemiskinan. Program bantuan tersebut, seperti BLT dan PKH, menjadi jaring pengaman sosial ketika harga kebutuhan dasar ikut meningkat.

Dampak positif lainnya terlihat pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Bantuan tunai memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah untuk mengatur pengeluaran mereka sesuai prioritas. Dalam jangka menengah, transfer langsung juga membantu menggerakkan ekonomi lokal karena uang bantuan biasanya dibelanjakan di warung, pasar tradisional, atau usaha kecil. Hal ini menciptakan efek berganda di tingkat komunitas dan memperkuat daya tahan ekonomi rakyat kecil. Studi Hanum dan Puspitasari (2023) di *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* menunjukkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan melalui mekanisme non-subsidi energi lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah, terutama di pedesaan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pengalihan subsidi ini juga menimbulkan efek sementara yang cukup berat. Kenaikan harga BBM secara langsung meningkatkan biaya transportasi dan produksi, yang kemudian memicu inflasi. Kondisi ini seringkali menekan kelompok masyarakat miskin yang belum sepenuhnya terjangkau oleh bantuan langsung. Menurut Yusuf dan Arifin (2024) dalam jurnal *Sustainability* oleh MDPI, keberhasilan pengalihan subsidi sangat tergantung pada kecepatan distribusi bantuan serta validitas data penerima manfaat. Bila

distribusi bantuan tertunda, masyarakat miskin bisa terdampak lebih besar oleh kenaikan harga sebelum mendapatkan kompensasi yang dijanjikan.

Selain itu, dampak kebijakan ini juga bersifat jangka panjang. Dengan berkurangnya beban subsidi energi di APBN, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mendanai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan. Namun, literatur juga menekankan bahwa dampak pemerataan tidak otomatis terjadi — perlu pengawasan ketat agar dana yang dialihkan benar-benar digunakan untuk pembangunan sosial dan tidak bocor dalam proses birokrasi.

Secara keseluruhan, pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Jika dilaksanakan dengan basis data yang akurat dan sistem penyaluran yang efisien, kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin sekaligus memperbaiki struktur keuangan negara. Namun, keberlanjutan program tetap bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi, serta perbaikan sistem administrasi sosial yang memadai agar manfaatnya benar-benar terasa bagi seluruh rakyat kecil.

#### **4. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM ke Subsidi Langsung**

Meski dinilai lebih tepat sasaran, pelaksanaan kebijakan pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah masalah ketepatan data penerima bantuan. Banyak masyarakat miskin yang belum tercatat dalam *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, masih ditemukan penerima bantuan dari kelompok mampu karena kurangnya validasi data. Menurut Astuti dan Hardianto (2022) dalam *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, perbedaan data antarinstansi dan keterlambatan pembaruan menyebabkan distribusi subsidi langsung tidak optimal dan sering memicu kecemburuan sosial di tingkat desa.

Tantangan lain terletak pada kesiapan infrastruktur digital dan mekanisme distribusi bantuan. Di beberapa wilayah terpencil, akses ke layanan perbankan dan sistem pembayaran digital masih terbatas, sehingga penyaluran bantuan tunai sering terhambat. Selain itu, masyarakat di daerah pedesaan belum sepenuhnya memahami mekanisme bantuan elektronik seperti e-wallet atau transfer bank. Hal ini memerlukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif agar bantuan benar-benar sampai ke tangan penerima yang sah. Dalam konteks ini, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, perbankan nasional, dan pemerintah daerah agar proses penyaluran berjalan lancar dan transparan.

Dari sisi sosial, pengalihan subsidi BBM sering menimbulkan penolakan di awal implementasi. Masyarakat cenderung menilai kebijakan ini sebagai beban tambahan karena kenaikan harga BBM secara langsung menaikkan biaya hidup. Tanpa komunikasi publik yang baik, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, strategi komunikasi yang terbuka dan berbasis data sangat dibutuhkan untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini. Contohnya, Sugandi et al. (2017) mencatat bahwa keberhasilan implementasi program BLT pada masa reformasi subsidi sangat bergantung pada transparansi dan penjelasan publik yang intensif di awal pelaksanaan.

Namun di balik tantangan, kebijakan ini menyimpan peluang besar. Pengalihan subsidi BBM membuka ruang bagi efisiensi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Dengan berkurangnya beban subsidi energi, pemerintah bisa memfokuskan dana pada sektor yang memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, digitalisasi penyaluran bantuan melalui sistem perbankan dan aplikasi sosial memungkinkan pengawasan yang lebih mudah, mengurangi potensi kebocoran dana, dan mempercepat pencairan bantuan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung bukan hanya kebijakan penghematan anggaran, tetapi juga langkah menuju tata kelola keuangan negara yang lebih adil dan efisien. Selama pemerintah mampu memperbaiki sistem pendataan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menjaga transparansi, kebijakan ini berpotensi menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat. Tantangan tetap ada, tetapi peluang untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dan memperkuat fondasi ekonomi nasional jauh lebih besar.

#### 4. Kesimpulan

Kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin merupakan langkah penting pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan keadilan sosial. Selama ini, subsidi BBM sering tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Dengan mengalihkan subsidi ke bantuan langsung, pemerintah berusaha agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat miskin yang membutuhkan. Kebijakan ini juga membuka ruang fiskal lebih luas untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas anggaran publik. Dari sisi sosial dan ekonomi, kebijakan ini terbukti membantu menjaga daya beli masyarakat miskin dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Program bantuan langsung seperti BLT, PKH, dan BPNT menjadi instrumen penting untuk menekan dampak kenaikan harga BBM dan memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Meski masih ada tantangan dalam hal akurasi data penerima, koordinasi antar lembaga, dan resistensi masyarakat, arah kebijakan ini sudah tepat. Dengan perbaikan berkelanjutan dan pengawasan yang kuat, kebijakan pengalihan subsidi BBM dapat menjadi fondasi bagi terciptanya sistem fiskal yang lebih efisien, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

#### Referensi

1. Astuti, R., & Hardianto, A. (2022). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 7(2), 113–125.
2. Hanum, D., & Puspitasari, E. (2023). *The Impact of the Increase of Oil Fuel Price and Government Subsidy on Indonesia's Economic Performance*. International Journal of Energy Economics and Policy, 13(4), 172–183.
3. Sugandi, E., Maulana, A., & Prasetyo, R. (2017). *Case Study on Unconditional Cash Transfer Program as Compensation for Fuel Subsidy Reduction in Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Pembangunan Perkotaan, 9(1), 45–56.
4. Yusuf, A. A., & Arifin, M. (2024). *Equity and Efficiency: An Examination of Indonesia's Energy Subsidy Policies*. Sustainability, 16(1), 407. MDPI.
5. Suryani, N. (2020). *Analisis Dampak Pengurangan Subsidi BBM terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara.
6. Pratama, R., & Yusuf, A. (2021). *Dampak Reformasi Subsidi Energi terhadap Kinerja Fiskal Indonesia*. Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia, Kementerian Keuangan.
7. Yuliani, F. (2022). *Efisiensi Belanja Pemerintah Pasca Pengalihan Subsidi BBM*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.
8. Sa'diyah, S. S., Saepudin, E. A., Cahya, R., Rosita, S. L., & Ayun, N. Q. (2025). Kebijakan Subsidi BBM. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 286-293.
9. Uswatun, H. (2024). Literature Review: Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(2), 1028-1040.
10. Anas, M. (2019). Reforming spending policy and its impact on Indonesia's economy: The case of fuel subsidy and infrastructure. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 12-27.
11. Jazuli, M. R. (2022). Political economy of fuel subsidy reforms in Indonesia: a critical review.
12. Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2).
13. Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146-167.
14. Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), 182-195.
15. Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Gas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 114-130.